

**ETIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
(Studi Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur
Provinsi Bengkulu)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

**EKSA DISANTO
NPM. 1421020066**

Jurusan : Siyasa Syar'iyah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

Dalam Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat. Pemilu tingkat Desa ini merupakan ajang kompetensi politik yang begitu menarik kalau dapat di manfaatkan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat. dan pada momen ini masyarakat yang menentukan pemimpin Desanya selama 6 tahun kedepan. Banyak bentuk pesta demokrasi yang telah di gelar dalam kehidupan politik kita zaman sekarang atau di zaman now ini. Pilpres, pilkada Gubernur, pilkada Bupati, dan pemilu legislatif. Tak ketinggalan juga adalah pilkades. Begitu menarik bagi sang penulis untuk mengkajinya lebih dalam tentang etika politik budaya pemilihan Kepala Desa, di Desa Bukit Makmur ini.

Dari latar belakang yang telah di paparkan di atas maka pokok rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana pelaksanaan etika politik dalam pemilihan Kepala Desa, di Desa Bukit Makmur kecamatan Muara saung Kabupaten Kaur provinsi Bengkulu ? Dan Bagaimana etika politik dalam pemilihan Kepala Desa perspektif pihq *siyasah*.

Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan etika politik dalam pemilihan kepala desa, khususnya di desa Bukit Makmur. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan etika politik dalam pemilihan kepala desa.

Metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini, merupakan penelitian lapangan (*fiel research*) yaitu penelitian yang terjun langsung ke lokasi Desa Bukit Makmur yang menjadi objek penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada responden.

Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah mengumpulkan upaya pengumpulan data, penulis juga akan mengalisa data dalam penelitian menggunakan analisa data secara deduktif dan induktif kemudian penulis mengadakan perbandingan antara teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan guna untuk mengambil kesimpulan tersebut.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703531,780421

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Etika politik dalam pemilihan kepala Desa persseptif
fiqh siyasa (studi di Desa Bukit Makmur
kecamatan Muara sahung kabupaten Kaur provinsi
Bengkulu)
Nama : Eksa Disanto
NPM : 1421020066
Jurusan : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, Februari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H. Yusuf Baihaqi, Lc. MA.

Eko Hidayat, S.Sos. M.H.

NIP.19740307200121002

NIP.197512302003121001

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah

Drs. Susiadi As, M.Sos.I.

NIP.197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

A Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703531,780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: “ETIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (studi di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Muara Saung, Kabupaten Kaur provinsi Bengkulu)”, Disusun Oleh: EKSA DISANTO, NPM: 1421020066, Program studi : Hukum Tata Negara (siyasah Syar’iyyah), Telah Diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN raden intan Lampung, Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 maret 2019.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin S.H., M.H.

Sekretaris : Hendri S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, L.c., M.A.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**

**Din Lamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760901 199703 1 002**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS.An-Nissa :59)



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Eksa Disanto lahir di Ulak lebar pada,28 Desember 1996, sebagai anak bungsu dari 3 (Tiga) bersaudara buah cinta dari pasangan ayahanda Mawiri dan ibunda Sulaimah.

Pendidikan formal ditempuh pada tahun 2002 di SD Negeri 1 Muara saung dan lulus tahun 2008, pada tahunbersamaan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Pulau panggung hingga lulus pada tahun 2011, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan setingkat SMA di MA Barokah al haromain pulau panggung semende dan tamat pada tahun 2014. Kemudianpada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah dan Hukum pada Jurusan Siyasah Syari'iyah sampai sekarang.

Pengalaman organisasi, disaat penulis menempuh pendidikan MA AL haromain penulis aktif dibidang keorganisasian sekolah (OSIS) sebagai perangkat priode 2013, adapun untuk organisasi ekstra kampus penulis tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sejak tahun 2014 hingga sekarang, dan juga tergabung dalam Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Semende (IPMS) wilayah Lampung, serta tergabung pada yayasan Kuntau Semende Indonesia (KUASE-I), dan UKM INKAI, dan selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti berbagai seminar/pelatihan yang diadakan di dalam kampus UIN maupun di luar kampus.

KATA PENGANTAR

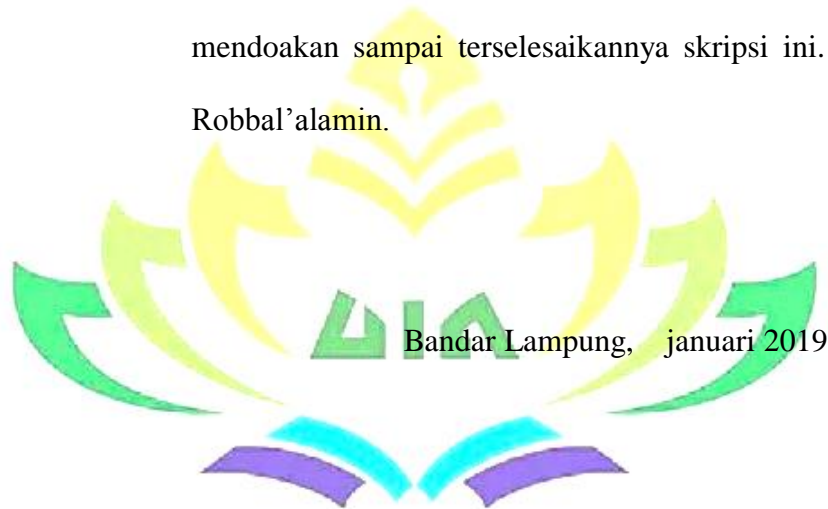
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan sampai akhir zaman.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Tanpa bimbingan dan bantuan ketersediaannya fasilitas, skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dapat belajar dan terus belajar serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Drs. Susiadi AS, M.Sos.I. Selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi Lc., M.A. selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu serta pikiran dalam membimbing, mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Eko Hidayat, S.sos. M.H. Selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

5. Pimpinan beserta staff perpustakaan pusat dan Fakultas Syari'ah Syari'iyah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan data, dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Sahabat-sahabatku angkatan Tahun 2014 serta rekan-rekan Mahasiswa yang ikut membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas jasa dan kebaikan pada semua pihak yang telah membantu serta mendoakan sampai terselesaikannya skripsi ini. Amin Yaa Robbal'alamin.



Bandar Lampung, januari 2019

EKSA DISANTO
NPM. 1421020066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Permasalahan	4
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II. LANDASAN TEORI	21
A. Etika Politik	21
1. Pengertian Etika Politik	21
2. Etika Politik dalam Tataran Tioritas	21
3. Etika Politik dalam Pataran Praktis	25
B. Pemilihan Kepala Desa	27
1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa	27
2. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa	28
C. Fiqih Siyasah	30
1. Pengertian Fiqih Siyasah	30
2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah	32
3. Pemilihan pemimpin dalam Fiqh Siyasah	33
BAB III. PENYAJIAN DATA PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Desa Bukit Makmur	42
1. Sejarah Desa Bukit Makmur	42
2. Visi dan Misi Desa Bukit Makmur	44
3. Kondisi Geografis	44
4. Kondisi Demografis	45
5. Struktur Pemerintahan Desa Bukit Makmur.....	49
B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Bukit Makmur	56
1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	56
2. Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa	64

BAB IV. ANALISIS	70
A. Pelaksanaan Etika Politik dalam Pemilihan Kepala Desa	70
B. Etika Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqih Siyasah .	72
BAB V. PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Etika Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu) untuk memperoleh gambaran yang jelas dari judul tersebut, ada beberapa istilah yang perlu penulis uraikan, antara lain:

Etika adalah berasal dari bahasa Yunani *ethos* (kata tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah *ta, etha*, yang berarti adat istiadat.¹ Sedangkan politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.²

Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia, atau cabang filsafat yang membahas prinsi-prinsip moralitas politik dengan kata lain etika politik merupakan prinsip moral tentang baik buruknya dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik.

Etika politik merupakan prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya

¹Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h.75

²Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010).h.1

dinyatakan dalam konstitusi Negara.³ Bahwasannya, pelaksanaan sosialisasi politik dapat dilaksanakan dengan baik melalui berbagai sarana yang ada, maka masyarakat dalam kehidupan politik kenegaraan sebagai satu sistem akan lahir dan berkembang budaya politiknya secara proporsional, jujur dan adil, serta bertanggung jawab sehingga terwujudlah budaya politik santun, bersih dan beretika. Ini berarti, tanggung jawab masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁴

Pemilihan Kepala Desa adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat. Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya.⁵

Perspektif adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan⁶.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Permendagri No.29 Tahun 2006) dalam Pasal 4 ayat (1) menetapkan bahwa materi muatan peraturan desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan

³Wahyu Widodo, "Muwujudkan Budaya Politik Santun, Bersih, dan Beretika". *Jurnal Humanika*, Vol.19 No. 1 (2014), h. 115.

⁴*Ibid.* h. 117.

⁵Widjaja, HAW. *Pemerintah desa dan administrasi desa Menurut undang undang nomor 5 tahun 1979 (sebuah tinjauan)*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008). h. 28

⁶Deparemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470

yang lebih tinggi.⁷

Fiqh siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya.

Desa Bukit Makmur merupakan salah satu desa di Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur, Secara administratif Desa Bukit Makmur mulai berdiri pada Tahun 2000. Desa ini merupakan Desa kecil di sebelah utara Ibu Kota Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah 983,15 Ha.

Berdasarkan istilah-istilah di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi Etika Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah adalah pandangan yang berpijak pada syari'at Islam tentang etika politik terhadap politik atau kegiatan keputusan suatu negara untuk meraih kekuasaan konstitusional di daerah lingkup Desa yaitu Desa Bukit Makmur.

B. Alasan Memilih Judul

Yang mendorong penulis untuk memilih judul tersebut diatas adalah:

1. Karna pada permasalahan yang ada pada saat ini etikan politik di desa, tepatnya di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur cenderung kurang baik disebabkan oleh berbagai alasan yang berkenaan dengan sikap politik msyarakat dilokasi penelitian.

⁷Nike K. Rumomoy, "Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011". *Jurnal Prinsip-Prinsip Pembentukan*, Vol. XXI No. 3 (April-Juni 2013), h. 3.

2. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Siyasah.

C. Latar Belakang Masalah

Demokrasi secara umum memiliki arti sebagai suatu bentuk politik pemerintahan yang di tentukan oleh rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa saja mereka yang memiliki kekuasaan dan berhak untuk memerintah. Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi. Indonesia mengadakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali.

Kualitas demokrasi sebenarnya didasarkan pada banyak hal, khususnya menyangkut tentang transparansi anggaran, partisipasi kelembagaan lokal, dan akomodasi kepentingan masyarakat di dalam pengambilan keputusan atau peraturan di daerah. Pelaksanaan pemilihan bisa saja bervariasi, namun intisarinya tetap sama untuk semua masyarakat demokratis yakni akses bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk mendapat hak pilih, perlindungan bagi tiap individu terhadap pengaruh suara, dan perhitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil pemungutan suara.⁸

Dapat kita awali dengan suatu pemahaman bahwa desa itu adalah suatu hasil perpaduan antara berbagai kelompok kegiatan manusia dengan lingkungannya. Secara lebih formal desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan

⁸Rachmad K Dwi Susilo, *Kebijakan Elitisi Politik Indonesia* (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2006) h. 180

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Ferdinand dan Tonnies mengemukakan desa adalah tempat tinggal suatu masyarakat yang bersifat “ *gemeinschaft*” yaitu saling terikat oleh perasaan dan persatuan yang masih erat. Berdasarkan kamus sosiologi, desa mengandung kompleksitas saling berkaitan satu sama lain diantara unsur-unsurnya, yang sebenarnya desa masih dianggap sebagai standar pemeliharaan kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli seperti gotongroyong, keberibadian dalam berpakaian, adat istiadat dan kehidupan moral dan sebagainya.

Linton dalam Soemardjan dan Soemardi mengartikan masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan social dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas.⁹ Mengenai Undang-undang No 19 Tentang Desapraja, yang memayungi desa dengan berbagai bentuk institusi dengan ciri khasnya yang mengakar pada masyarakat. Namun, tahun 1967 pemerintah Orde Baru “ UU No 18 tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah dan mengganti dengan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah. Institusi pemerintahan terkecil (Desapraja) yang ada di daerah harus diganti dan diseragamkan menjadi “Desa”.

⁹Rasyid Masri, *Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan pedesaan* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 1

Istilah desa seperti yang dikemukakan itu dengan dikeluarkannya Undang- Undang No 6 Tahun 2014 mengenai desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁰

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat dua undang-undang lain yang membahas pemerintahan daerah yaitu undang-undang No 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang No 23 tahun 2014. Namun, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yang paling baru dan yang paling berlaku saat ini ialah Undang-Undang No 9 tahun 2015. tentang Pemerintah Daerah mengakui adanya Otonomi yang dimiliki oleh Desa dan Kepala Desa dapat diberikan penguasaan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintahan tertentu, Pemerintah Desa merupakan struktur Pemerintahan paling bawah yang secara langsung berintraksi dengan masyarakat, sehingga kewenangan pemerintah

¹⁰Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan* (Makassar:Alauddin University Press, 2014) h. 55

desa untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat.¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan di daerah kecil yaitu Desa yang dipilih masyarakat secara langsung oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan yang berlaku, dengan masa jabatan kepala Desa (lima) 5 tahun dengan ketentuan tata cara pemilihan kepala Desa (pilkades). Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab pada Rakyat Desa dan prosedur pertanggung jawaban yang di sampaikan kepada Bupati melalui camat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemilihan Kepala Desa menurut peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, pada pasal 43 disebutkan bahwa BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis (enam) 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan. BPD memproses Pemilihan Kepala Desa paling lama (empat) 4 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.¹²

Mengenai pasal 47 sampai 52 disebutkan bahwa untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah di tentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan Kepala Desa kepada BPD. Panitia

¹¹Lihat UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

¹²UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang Peraturan Daerah.

pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan, calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Selain itu, dalam sistem Pemilihan Kepala Desa tidak lepas dari dinamika perkembangan politik lokal. Dalam pemilihan kepala desa turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi disetiap putaran pemilu di Indonesia. Para calon-calon Kepala Desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan kepala desa agar dapat memenangkan kekuasaan di desa. Kekuasaan selalu ada dalam setiap proses politik yang merupakan tujuan dari setiap pemilihan pemimpin. Sehingga dalam memenangkan proses pemilihan kepala desa untuk mendapatkan kekuasaan ditingkat desa hingga perlu adanya strategi kampanye maupun strategilainnya yang mengandung unsur kecurangan yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan pemilihan.¹³

Seperti halnya Pemilihan Kepala Desa serentak yang dilaksanakan di Kabupaten Kaur tepatnya Kecamatan Muara Saung, salah satu Pemilihan Kepala Desa Serentak yang diprogramkan oleh Gusril Fausi selaku Bupati Kaur. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang telah dilaksanakan menyisakan masalah hukum yang tidak dituntaskan, Bupati Kaur dan Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa mengabaikan masalah-masalah seperti pemalsuan berkas, pemalsuan keterangan domisili, pemalsuan ijazah, dan sudah dinyatakan batal namun tiba-tiba bisa diikutsertakan.

¹³Lihat UU pasal 72 Tahun 2005 tentang desa, UU nomor 52 tentang masa jabatan Kepala Desa (enam) 6 tahun dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pemilihan Kepala Desa merupakan ajang pemilihan pemimpin yang ada di Desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk penerepan peraturan menteri dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Hal ini yang menjadikan peran serta masyarakat untuk menentukan pemimpin yang baru. Sikap politik dari masyarakat harus berada dalam lingkaran politik yang sedang terjadi di desa seperti Pemilihan Kepala Desa.

Politik masyarakat yang terjadi saat cenderung melihat dari etnis salah satu calon. Hal ini dilihat dari jumlah etnis semende yang mendominasi sebagai etnis mayoritas yang di Desa Bukit Makmur. Hal ini akan berdampak pada pelaksanaan pemilihan kepala desa, jika melihat dari sikap politik yang terjadi di Desa Bukit Makmur masyarakat cenderung menilai calon Kepala Desa dari sisi etnis. Sedangkan di Desa Bukit Makmur mayoritas etnis semende, meskipun di Desa Bukit Makmur ada etnis lain seperti Jawa, Sunda.

Pasal 31 dan Pasal 34 UU Desa telah mengatur secara tegas prinsip pemilihan Kepala Desa. Pertama, pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Kebijakan pemilihan Kepala Desa serentak ini ditetapkan dalam Perda. Kedua, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa. Ketiga, pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁴

¹⁴Pemilihan Kepala Desa” (On-line), tersedia di:
http://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/kepala-desa/pemilihan-kepala-desa/ (16 juni 2016).

Pada pasal 11 disebutkan bahwasannya dalam pemilihan Kepala Desa setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau pemilih, dalam pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.

Pada perda no 3 tahun 2015 pasal 72 Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun. Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

Peraturan menteri dalam negeri RI No 112 Tahun 2014 dalam pasal 30 Pelaksanaan kampanye dilarang :

- a. Mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan Undan-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, dan membentuk negara kesatuan republik indonesia
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan rebublik indonesia
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan / atau calon yang lain.
- d. Menghasud dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat
- e. Mengganggu ketertiban umum
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan / atau

calaan yang lain.

- g. Merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye calon
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
- i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/ atau atribut calon yang bersangkutan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.¹⁵

Untuk melihat hal itu, tampaknya perlu dipahami bagaimana format partisipasi politik di beberapa negara berkembang yang menganut model pembangunan yang berbeda. Maka hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai partisipasi politik khususnya di Desa Bukit Makmur.

Untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat di perlukan partisipasi politik yang besar dari seluruh elemen masyarakat yang ada. Tidak hanya ikut dalam proses pengambilan keputusan saja tapi juga ikut dalam pemilihan pemimpin bangsa tersebut yang pada akhirnya akan memperjuangkan hak dari masyarakat itu sendiri. Dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

¹⁵ <https://www.slideshare.net/mobeli/abiyanka/permendagri-no112th2014> pemilihan kepala desa.

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٦٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁶

Ayat tersebut menerangkan tentang larangan-larangan Allah kepada manusia agar tidak memisahkan diri dari jama'ah apalagi dengan menggunakan kekerasan dan mengacaukan keamanan umat manusia, disatu pemberontakan yang dilakukan terhadap ulil amri merupakan perbuatan tidak terpuji. Ketidak loyalan masyarakat kepada pemimpin maka akan terjadi saling gunjing, ghibah, dan saling berprasangka buruk. Jika didalam masyarakat sudah terjadi kondisi semacam ini maka konflik fisik akan terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, disinilah pentingnya pengelolaan masyarakat yang rukun, aman dan tentram, ketentraman akan menjamin berlangsungnya kaidah-kaidah Islam dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Islam, baik secara teoritis maupun praktis sangat relevan terhadap kehidupan politik karena Islam tidak hanya agama ritual tetapi juga agama peradaban yang secara konseptual dan realitas historis telah

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabunnuzul dan Hadits Sahih*, (Jakarta: SYGMA, 2010), h. 517

membentuk tatanan budaya yang bersandar pada nilai-nilai profetika, seperti nilai amanah, kejujuran dan keadilan. Nilai-nilai ini senantiasa menjadi tolak ukur dalam Pemilihan Umum untuk memilih para kandidat *ulil amri* atau pemimpin secara langsung dengan jujur, adil dan tidak diskriminatif. Sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi :

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطَرَ وَالْإِمَامُ
الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ (رواه الترمذي)

Artinya : “Tiga orang yang do’a mereka tidak tertolak, yaitu: seorang yang berpuasa hingga berbuka, seorang imam (penguasa) yang adil dan do’anya orang yang di dzalimi.” (HR Imam Tirmidzi)

Dengan demikian dalam pandangan Islam pemilihan umum yang mungkin memunculkan konflik-konflik sosial yang dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan umat Islam, apalagi sampai mengobarkan permusuhan dan kebencian jelas-jelas sangat dilarang, sebaliknya dalam pandangan Islam suksesi menjadi sunnatullah akan tetapi dilandasi dengan semangat kebersamaan dan membangun untuk kemakmuran bersama. Artinya harus ada keselarasan antara pemimpin dan masyarakat agar terciptanya kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran permasalahan pada latar belakang masalah di atas peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan etika politik dalam pemilihan Kepala Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu?

2. Bagaimana Etika Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk:
 - a. Mengetahui faktor-faktor secara lebih mendalam tentang partisipasi politik masyarakat Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur.
 - b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap partisipasi politik masyarakat Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur.
2. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah untuk:
 - a. Secara teoritis yaitu menambah hasanah keilmuan tentang pemikiran politik Islam yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat.
 - b. Secara praktis yaitu agar dijadikan referensi tambahan terkait dengan perkembangan politik yang Islam di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

- a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang terjun langsung ke lokasi desa Bukit Makmur yang menjadi objek penelitian lapangan. Dalam penelitian ini,

penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada responden¹⁷

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipakai penulis dalam menyusun skripsi ini adalah *empirisanalatik*, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta seadanya (*fact finding*) serta menemukan korelasi antara yang satu dan yang lainnya, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori atau kaidah umum yang berlaku.¹⁸

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah semua individu untuk semua kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel yang hendak digeneralisasikan.¹⁹ Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian.²⁰ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bukit Makmur yang berjumlah 340 KK yang mempunyai hak pilih.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²¹ Untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini maka

¹⁷ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 10.

¹⁸ Surtisno Hadi, *Metodelogi Reasearch* (Yogyakarta: Fak Psikologi UGM, 1985), h.3

¹⁹ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, (Renika Cipta, Jakarta, 2000), h. 206.

²⁰ *Ibid*, h. 130.

²¹ *Ibid.*, h. 109.

diperlukan sampel sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi agar lebih mudah dalam melaksanakan penelitian, atau bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²²

1) Teknik sampling merupakan upaya penelitian untuk mendapat sampel yang representatif (mewakili), yang dapat menggambarkan populasinya. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti ialah *purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah sampel yang dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya.

2) Sampel yang diambil peneliti berjumlah:

- a) Kepala Desa Bukit Makmur
- b) Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa Bukit Makmur 2 orang
- c) Masyarakat yang memiliki hak pilih 7 orang

3. Sumber data

a. Data premier

Data premier merupakan data yang didapat dari sumber pertama, yaitu mengumpulkan data premier dari jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam bentuk responden.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data premier atau informasi kedua yang berhubungan dengan masalah penelitian.

²²Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Alfabeta, Bandung, 2009), h. 116.

yaitu itu berupa dokumen–dokumen, seperti rekapitulasi jumlah pemilih, jumlah TPS, jumlah responden maupun aktivitas sosial dan politik masyarakat yang terangkum dalam aktivitas politik masyarakat. Selain itu, data sekunder lainnya dengan melakukan kajian pustaka, yang bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, koran, internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman secara holistik mengenai pandangan atau perspektif seseorang terhadap isu, tema atau topik tertentu. Yakni dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka langsung kepada orang yang bersangkutan (yang diinginkan peneliti).

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil. Wawancara dalam penelitian ini menjadi metode pengumpulan data utama.

b. Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan.

Observasi digunakan untuk mencari data dalam mengamati etika politik dalam pemilihan Kepala Desa Desa Bukit Makmur. Dalam penelitian ini jenis observasi digunakan adalah observasi non partisipan, yaitu dimana penulis meneliti tanpa mengikuti kegiatan tersebut. Metode observasi ini digunakan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti monograf, catatan serta buku-buku yang ada.²³ Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dalam pokok masalah yang peneliti ambil. Dokumentasi bisa berupa data-data dari data Desa Bukit Makmur ataupun data dari lembaga-lembaga yang terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil.

²³ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), h.57-66

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui instrumen penelitian dimaksudkan untuk mengetahui atau menjawab dari pokok-pokok masalah dalam penelitian ini. Analisis data ini digunakan untuk mengolah data yang telah ditemukan peneliti selama melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti.

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menghimpun dan mengolah data yang sudah ditentukan, setelah data terkumpul secukupnya, maka penulis membahas dengan menganalisis menggunakan metode analisis.²⁴

a. *Data Reduction* (Merangkum Data)

Dalam kaitan ini penulis menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkategorikan kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data sehingga menyimpulkan data.

b. *Data Display* (Menyajikan Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. *Display* data atau penyajian data adalah “kegiatan yang mencakup mengorganisasikan data dalam bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Dalam kaitan ini penulis berusaha

²⁴Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004) h. 127.

menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Perosesnya dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

c. *Verification* (Menarik Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan atau *Verification* adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, alur sebab atau proposisi. Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan pendekatan berfikir induktif yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut menjadi umum. Cara berpikir induktif adalah suatu cara untuk mengambil kesimpulan dari yang khusus ke umum.²⁵

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Etika Politik

1. Pengertian Etika Politik

Etika adalah berasal dari bahasa Yunani *ethos* (kata tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah *ta, etha*, yang berarti adat istiadat. Sedangkan politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu²⁶. Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia.

2. Etika Politik dalam Tataran Tioritas

Konsep manusia sebagai makhluk politik menunjukkan bahwa pemikiran politik yang menyangkut proses dan hasil dari kegiatan politik suatu sistem politik suatu pemerintahan berdasarkan pada esensi (hakikat) manusia. Hal ini berarti manusialah yang harus menjadi kriteria atau ukuran dan tujuan. Walaupun dalam politik orang bisa saja meremehkan fakta bahwa pada dasarnya manusia itu ambivalen, maka kekuasaan dimanapun dan kapanpun selalu tidak hanya digunakan dengan baik tetapi juga disalahgunakan. Oleh sebab itu sejak dulu kala manusia mengupayakan untuk menentang penyalahgunaan kekuasaan, terutama

²⁶Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010).h.1

yang dilakukan oleh mereka para pemegang kekuasaan politik, Term etika (filsafat moral) dapat dipakai dalam arti nilai-nilai. dan norma-norma moral yang menjadi dasar seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika memberikan dasar moral kepada politik. Menghilangkan etika dari kehidupan politik berimplikasi pada praktek politik yang bersifat Machavellistis, yaitu politik sebagai alat untuk melakukan segala sesuatu, baik atau buruk tanpa mengindahkan kesusilaan, norma dan berlaku seakan bernuansa positivistik (bebas nilai).

Etika politik termasuk dalam kelompok etika sosial yakni yang membahas norma-norma moral yang seharusnya menimbulkan sikap dan tindakan antar manusia, karena hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Etika politik tidak menawarkan suatu sistem normatif sebagai dasar negara. Etika bersifat reflektif yakni memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana masalah- masalah kehidupan dapat dihadapi, tetapi tidak menawarkan tentang bagaimana cara memecahkannya. Dengan demikian etik politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan sebagai warga negara terhadap negara, terhadap hukum yang berlaku dan lain sebagainya . Karena kebaikan manusia sebagai manusia dan kebaikan manusia sebagai warga negara tidak identik²⁷.

²⁷Runi Hariyantati, "Etika Politik Dalam Negara Demokrasi", *Jurnal Demokrasi*, Vol. II No 1

Fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif dan argumentatif. oleh karena itu tugas etika politik subsider dalam arti membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologi dapat dijalankan dengan objektif artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua pihak yang mengerti permasalahan. Etika politik dapat memberikan patokan-patokan, orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang memang ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia.

Selain itu etika politik dapat berfungsi sebagai sarana kritik ideologi (bukan negara dan hukum) berupa paham paham dan strategi legitimasi yang mendasari penyelenggaraan negara. Jadi etika politik hanya dapat membantu usaha masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Misalnya, dengan merefleksikan inti/ hakikat keadilan sosial, bagaimana kekuasaan harus ditangani agar sesuai dengan martabat manusia. Sejak Aristoteles para filosof telah merenungkan manusia sebagai makhluk politik (zoonpoliticon), makhluk komunitas Nietzsche, Max Weber dan Hans Monrgethau barangkali adalah orang orang pertama yang memahami sebutan makhluk politik (secara esensial) dalam term lain adalah makhluk yang mencari kekuasaan. Dan jika kita ingin mencari dan membahas

konsep kekuasaan maka kita tidak dapat terlepas dari penilaian atas kekuasaan di dalam politik yang selalu bergantung secara fundamental pada pandangan tertentu tentang manusia.

3. Etika Politik dalam Tataran Praktis

a. Etika Politik dan Ilmu-Ilmu Politik Lain

Secara lebih terinci, dapat dibedakan antara tingkatan kriteria bagi betul-salahnya tindakan politik. Ditingkat pertama kita menemukan prinsip-prinsip moral dasar, misalnya prinsip keadilan. Prinsip-prinsip kedua bersifat menengah dan sudah mengacu kesuatu bidang permasalahan tertentu, misalnya prinsip bahwa kekuasaan harus dilegitimasi secara demokratis. Tingkat tiga menyangkut kriteria-kriteria penilaian yang sesuai dengan zaman dan situasi²⁸.

Prinsip-prinsip itu adalah wewenang khas etika umum. Sedangkan etika politik termasuk pada bidang tingkat dua untuk menentukan kewajiban yang bertanggung jawab dalam bidang politik. Prinsip-prinsip itu hanya dapat ditentukan secara positif dengan mengacu pada bidangnya.

Dan dalam praktiknya, etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip moral dasar. Untuk itu, etika politik berusaha membantu masyarakat untuk menegajawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata.

²⁸Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta : PT Gramedia), h.23-24

b. Pendekatan Kritis-negatif

Kritis karena kita tidak mulai dengan ulasan pendapat sendiri, melainkan bertolak dari teori-teori dan paham-paham relevan yang ada, yang kemudian kita periksa secara kritis. Negatif karena kita tidak mulai dengan menetapkan terlebih dahulu secara positif manakalah prinsip-prinsip yang kami andaikan, melainkan kita memeriksa dan membongkar pandangan-pandangan moral politik yang ada, membuang apa yang tidak tahan uji, dan dengan demikian kita akhirnya dapat merumuskan apa yang tetap dapat dipertahankan sebagai prinsip tingkat II.²⁹

Jadi negatif disini tidak dipakai dalam arti penilaian, melainkan dalam arti logis : prinsip-prinsip etika politik diperoleh dari apa yang tidak tersingkir dalam pemeriksaan terhadap pandangan-pandangan yang ada.

c. Pengandaian-pengandaian normatif

Pendekatan ini tidak berarti bahwa suatu etika politik tidak di datar belakang keyakinan-keyakinan dasar positif. Metode krisis negatif pun hanya dapat bekerja atas dasar pengandaian-pengandaian tertentu. Etika politik mengandaikan prinsip-prinsip etika dasar dengan beberapa implikasi langsung pada kedudukan manusia.³⁰

B. Pemilihan Kepala Desa

1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

²⁹ *Ibid.* h,26

³⁰ *Ibid.*

Pemilihan kepala desa adalah sarana pelaksanaan azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desa harus dipilih secara demokratis oleh masyarakat desanya sendiri. Sifat demokratis harus ada dan dipertahankan, bukan semata-mata karena sendi-sendi kehidupan demokratis dapat menjamin terselenggaranya pembangunan desa, akan tetapi pembangunan desa memerlukan dukungan dari masyarakat.

Menurut Sadu Wasistiono tentang pemilihan desa menyatakan bahwa apabila pemilihan umum merupakan pesta pemerintah, maka pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat. Pemilihan desa merupakan kesempatan rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka. Pemilihan kepala desa dilakukan dalam enam tahun. Hal ini sesuai dengan pasal 39 undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dengan demikian jelaslah bahwa kepala desa menjabat selaku pimpinan desa hanya 6 (enam) tahun, kemudian dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya³¹

2. Mekanisme Dalam Pemilihan Kepala Desa

³¹Mulyawarman, Prilaku Pemilih Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Kasus Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Vol 9, No 01 (2011)

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan Pemilihan kepala desa diatur dalam peraturan daerah kabupaten Bengkulu Selatan No 01 Tahun 2016 tentang pemerintahan desa. Dan peraturan pemerintah No 65 tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang PILKADES, yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah desa serta kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Serta dapat dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota dan masyarakat, sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3(tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. pada pasal 43 No 72 Tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis (enam) 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan. BPD memproses Pemilihan Kepala Desa paling lama (empat) 4 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.³²

Mengenai pasal 47 sampai 52 disebutkan bahwa untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat Desa, Pengurus Lembaga Masyarakat,

³²UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang Peraturan Daerah.

dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan Kepala Desa kepada BPD.

Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan, calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan. Pada saat melaksanakan pemilihan kepala desa dibentuk panitia pemilihan yang bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon kepala desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan Menteri dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa telah mengatur tahapan pemilihan kepala desa. Pengaturan pemilihan kepala desa dibagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu;

- a. mulai dari persiapan,
- b. pencalonan,
- c. pemungutan
- d. dan perhitungan suara serta penetapan.

Calon kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota dan sebelum memangku jabatannya, kepala

desa terpilih bersumpah/berjanji untuk memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dilaksanakan.

C. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.³³ Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalinya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, yakni al-qur'an dan hadits).³⁴

Siyasah secara etimologi memiliki beberapa arti yakni, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Secara terminologis, menurut Ibnu Manzhur, dalam buku Muhammad Iqbal, *siyasah* adalah memimpin ataupun mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.³⁵

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara sfesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetpan hukum, peraturan, dan kebijakan pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), h. 2.

³⁴ *Ibid*, h.22.

³⁵ *Ibid*, h.27.

Islam, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkannya dari kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara yang dijalankannya.³⁶

Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukuman yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia. untuk konteks Indonesia, misalnya, keluarnya UU No. 1/1974 tentang perkawinan, UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian disempurnakan oleh UU No. 3/2006 dan UU No. 50/2009, dapat dikatakan bagian dari siyasah syar'iyah pemerintah Indonesia. Dengan undang-undang tersebut umat Islam diberi fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan institusi keagamaan mereka dalam rangka pelaksanaan dan penerapan hukum Islam itu sendiri.³⁷

2. Ruang Lingkup dan Kajian Fiqh Siyasah

a. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Menurut Imam Al-Mawardi didalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undang), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara). Sedangkan menurut Imam

³⁶Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik* (Jakarta : Erlangga, 2008), h. 11.

³⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Op.Cit, h.12-13

Ibn Taimiyyah menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).³⁸

b. Sumber Kajian *Fiqh Siyasah*

Secara garis besar, sumber kajian fiqh siyasah yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan as-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu. Selain sumber al-Qur'an dan as-Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, 'urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adatistiadat setempat, pengalman masa lalu dan aturan-aturan yang dibuat sebelumnya.³⁹

Selain itu, sumber lain seperti perjanjian antarnegara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya dan juga tantangan yang dihadapi masyarakat bersangkutan. Hal ini yang membuat kajian fiqh siyasah menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

³⁸Muhammad Iqbal, *Op.Cit.* h.14

³⁹*Ibid*, h. 16

3. Pemilihan Pemimpin dalam *Fiqh Siyasah*

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan mungkin dapat hidup seorang diri, kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam akan menuntunnya untuk senantiasa berintraksi dengan manusia lain, perbedaan pendapat, ambisi dan kepentingan masing-masing pihak yang muncul proses intraksi tersebut, tidak menutup kemungkinan akan muncul lahirnya konflik, pertikaian, penindasan, peperangan dan pembunuhan atau pertumpahan darah, yang pada gilirannya nanti bisa berimplikasi pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia itu sendiri.

Biar dapat menghindari kejadian tersebut dan agar kehidupan dalam masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, damai, dan teratur, maka perlu dipilih pemimpin yang akan memandu masyarakat dalam menggapai segala manfaat sekaligus menghindarkan mereka dari berbagai *mufsadat*/ kerusakan.

Sebagaimana pendapat Imam Al-Gazali, Ibnu Taimiyah juga bahwa keberadaan Kepala Negara itu diperlukan tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhnya kebutuhan materi mereka saja, tetapi lebih dari itu juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah, Memandang sedemikian urgensi eksistensinya seorang kepala negara, *Ibnu Taimiyah* menyatakan berikut ini “60 tahun di bawah pemerintahan Imam/Kepala negara yang

zalim/tirani, lebih baik dari pada satu malam tanpa Kepala negara”. Baik dalam Al-qur’an maupun sunnah mendapat isyarat mengenai pentingnya memilih pemimpin, istilah yang lazim digunakan untuk menunjukan kepada pengertian, pemimpin yang dimaksud dalam Al-Qur’an antara lain adalah *ulil amri*, hal ini relevan dengan firman Allah SWT, (Q,S An-nisa, ayat 59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasulullah, dan ulil amri kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasulullah (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. An-nisa: ayat 59)

Dalam memahami *ulil amri*, dikalangan *mufasssir* terjadi variasi, interpretasi, Ahmad Musthafa Al-Maragi menyatakan mereka terdiri dari umara, hakim, ulama, dan semua pemimpin, yang menjadi rujukan umat dalam masalah yang bertalian dengan kebutuhan dan kemaslahatan umum.

Menurut Al-Gazali, bukan kewajiban individual (*wajib aini*), tetapi kewajiban koliktif (*wajib kifa'i/fardu kipayah*), karena itu seluruh umat Islam berdosa bila tidak melakukannya atau meninggalkannya. Namun terlepas

dosanya apabila ada yang telah mewakili, pendapat senada di sepakati pula oleh Al-Rayis, dan Mawardi.

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, hukum-hukum penyelenggara negara dalam syariat Islam, jika *imamah* kepemimpinan di ketahui sebagai hal yang wajib menurut syaria'at, maka status wajibnya *imamah* (kepemimpinan) adalah *fardhu kifaiyaah* seperti jihad, mencari ilmu. Artinya jika *imamah* (kepemimpinan) telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka status hukum *imamah* (kepemimpinan) adalah *fardhu kifaiyah*.⁴⁰

Pada masa Abu Bakar perkataan *khalifah* (dalam *khalifah* Rasul Allah) membawa pengertian asal yakni pengganti Nabi, pada masa Umayyah dan Abasiyah berkembang dengan pengertian subjektif (*khalifah* Allah), yaitu bahwa seorang *khalifah* adalah wakilnya Tuhan.⁴¹

Menurut Imam Al-Mawardi, dapat dikontekstualisasikan di era kontemporer bahwa syarat pemimpin sebagai berikut:

1. Amanah

Dalam Islam, amanah merupakan sesuatu yang harus di pelihara karena kelak akan di pertanggung jawabkan kepada Allah SW, kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus di jalankan dengan baik, sesuai dengan perintahnya Oleh karena itu Islam tidak dapat mentolelir segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Allah

⁴⁰ Ahmad Mubarak Al- Baghdadi, *Al- Ahkam As-Sulthoniyah*, (Maktabah Dar Ibnu Qutoibah – Kuwait, 1989)

⁴¹ Asep Gunawan, *Artikulasi Islam Kultural* (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2004),h.118.

memerintahkannya agar Manusia melaksanakan amanah yang di emban di pundaknya, hal ini sesuai firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S An-

nisa:58)

Ayat ini menegaskan konsep keadilan juga menetapkan dasar-dasar yang harus di pegangi oleh setiap pemerintahan demi mencapai keadilan dan supaya umat manusia tidak berpecah belah.⁴²

2. Adil

Islam menjamin politik yang adil. Politik yang adil dalam setiap umat adalah mengatur urusan dalam Negeri dan laur Negeri dengan sistem dan peraturan yang menjamin keamanan terhadap individu dan golongan serta asa keadilan di antara mereka, merealisasikan kemaslahatan, menghantarkan mereka agar lebih maju dan mengatur hubungan dengan orang lain. Hal ini terbukti dalam Al-Qur'an menetapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah *kulli* tentang sistem mengatur urusan umat dalam

⁴²Abdul Wahab khallaf, *politik hukum Islam* (yogyakarta : tiara Wacana yogya, 1994),

pemerintahan, kaidah-kaidah ini relevan pada situasi dan kondisi yang bersifat *majmu*, karna setiap umat berusaha dan menuntut suatu kemaslahatan.⁴³ Dalam Al-Qur'an di jelaskan

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ
أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم
بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (Q.S.Al-Maidah :42)

Kelak pada hari kiamat Allah SWT akan memberikan perlindungan kepada tujuh golongan Orang , salah satunya adalah seorang pemimpin yang adil, sebagaimana dikisahkan dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari :

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ عليه وسلم قال: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ

إِمَامٌ عَادِلٌ..... (رواه ابن هاجر)

⁴³ Abdul Wahab, Politik Hukum Islam, *Op.Cit*, h. 11

Artinya :“Rasuluallah SAW bersabda; ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan-Nya pada hari (pada hari kiamat) dimana pada hari itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan-Nya semata, salah satu dari ketujuh golongan tersebut adalah pemimpin yang adil.”⁴⁴ (Hadis Riwayat Ibnu Hajar)

3. Tanggung jawab

Berdasarkan konsep kebangsaaan dalam Islam bahwa orang yang beriman wajib berusaha memelihara persatuan dan kesatuan, dengan sikap toleransi,tenggang rasa, dan rasa bertanggung jawab.

Kunci utama seorang pemimpin menjalankan tugasnya adalah tanggung jawab, semua tugas akan terlaksana dengan baik apabila pemimpin itu mempunyai rasa tanggung jawab. Sebab di akhirat nanti para pemimpin akan di mintai pertanggung jawabnya.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya:“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah di perbuatnya.” (Q.S.Al-muddatsir : 38)

4. Merdeka

Kebebasan dan bertanggung jawab adalah dua hal yang saling melengkapi. Muslim tidak akan dapat menikmati kebebasan tanpa di ikuti dengan tanggung jawab. Kebebasan dalam Islam berarti bahwa setiap pribadi memiliki kebebasan dari berbagai bentuk perbuakan.⁴⁵

⁴⁴H.R. Ibnu Hajar, dalam Kitab *Fathu Bari*.

⁴⁵Muhammad Al-Buraey, *Islam :landasan Alternarif Administrasi pembagunan*, (jakarta:raja wali, 1986) h.157.

5. Repotasi bagus, terhormat dan berwibawa

Abu Bakar dipilih karna analog sebagai pemimpin dalam shalat jika Rasul berhalangan. Pemikiran yang menyertai hal ini adalah kriteria bahwa Kepala Negara itu berasal dari klan yang reputasinya bagus dan terhormat demi “integrasi bangsa dan Negara” (*thus the unity of the ummah could be preserved*). Abu Bakar di pilih karena berasal dari klan terhormat, Quraisy.

Dari cerita tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat menjadi pemimpi itu adalah berasal dari reputasinya bagus dan terhormat demi itegrasi bangsa dan Negara.

6. Tegas, berani, pantang menyerah dan lembut

Umar memiliki karakter yang kepribadiankuat yang senantiasa terlihat meski tampak keras,kasar dan galak. Sikap umar itu hanyalah penampakan luar yang lahir akibat akumulasi kepribadian ,kewibawaan dan konsistensinya terhadap sesuatu yang di yakini.

Seperti Umar yang pemberani, kita juga harus memilih pemimpin yang berani. Dari kebijakan politik Abu Bakar yang paling keras, Umar malah lembut. Allah berfirman:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya :“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.
(Q.S. Ali-imron: 159.)

7. Kuat mental, jasmani, dan rohani

Orang yang kuat rohaninya dapat di tandai dengan kuatnya ketaqwaanya kepada Allah SWT. Bertaqwa kepada Allah merupakan syarat penting seorang pemimpin. Sebab seorang pemimpin yang taat kepada Tuhanya maka akan menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini merupakan pemimpin yang beriman tahu kelak akan di mintai pertanggung jawaban oleh Tuhan atas apa yang dia pimpin selama ini.

8. Jujur, dan berperilaku baik

Pemimpin itu harus jujur dan selalu berbuat baik, karna pemimpin itu adalah panutan rakyatnya.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang
baik bagimu yaitu bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah
dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”
(Q.S. Al-Ahzab : 21)

Adapun mekanisme memilih pemimpin dalam Islam, Abu
Bakar sebagai khalifah pertama di saqifah Bani Sa'adah adalah hasil
musyawarah para sahabat senior yang menyakini khalifah atau
pengganti Nabi harus di pilih melalui musyawarah. Argumentasi
pemilihan Abu Bakar di bagun berdasarkan *qiyas* atau analogi, bukan
berdasarkan *nash*. Abu Bakar, menurut Umar selalu diminta oleh Nabi
untuk menggantikan beliau sebagai Imam shalat bilamana Nabi sakit,
disisi itu juga Abu Bakar adalah sahabat yang paling di sayangi oleh
beliau. Terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah sejak 11-13
Hijriah/632-634 M.

BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Bukit Makmur

1. Monografi Wilayah

Desa Bukit Makmur terletak di kecamatan Muara Saung. Kecamatan Muara sahung posisi geografisnya terletak dibagian barat daya paling ujung dari kabupaten Kaur dengan luas wilaya sekitar 426,64 Km2, atau 2,79 persendari total luas kabupaten Kaur.

Penduduk Desa Bukit Makmur Muara Sahung berasal dari suku Semende darat yang ada di Muara Due Sumatera Selatan, penduduk di Eks. Marga Muara Sahung (dipimpin Pasirah) disebut dengan Semende Lembak. Tahun 1965-1968 berdirinya kecamatan Muara Sahung terdiri dari 7 margayaitu :

1. MargaMuaraSahung
2. MargaKinal
3. MargaLuas
4. MargaSemidangGumai
5. Marga Are
6. MargaSindangDanau
7. MargaPulauBeringin

Bulan Oktober 1968, Bengkulu menjadi provinsi ke-26. Kecamatan Muara Sahung menjadi Kecamatan Kaur Tengah terletak di wilayah Tanjung Iman.(termasuk marga Kinal, Luas, Semidang Gumai). Sebelum Belanda masuk, desa ini bernama Tanjung Teriti, pada saat pemerintahan Belanda masuk, maka oleh nenek puyang nama desa diganti bukit makmur Muara Sahung dengan kewidanaan Kaur (demang), keresidenan Bengkulu. Ketika Bengkulu menjadi provensi, maka marga Sungai Are masuk Sumatera Selatan maka Muara Sahung menjadi desa dengan kecamatan Kaur Tengah. Ketika Kaur menjadi kabupatenpan datahun 2003 maka terjadi pemekaran wilayah kecamatan, maka pada tahun 2005 Muara Sahung menjadi kecamatan dengan 7 desa yakni desa :

1. Muara sahung

2. Ulak Lebar
3. Ulak Bandung
4. Bukit Makmur Transmigrasi 1995/SP 3.
5. Tri Tunggal Bakti (1990,SP 1)
6. Sumber Makmur (1993, SP 2)
7. Cinta Makmur

Kondisi topografi pada umumnya berbukit dengan ketinggian 942-1105 meter dari permukaan laut. Pada penulisan skripsi ini penulis mengambil desa Bukit Makmur sebagai tempat penelitian. Penduduk tersebut adalah orang suku asli Semende dan ada sebagian dari suku Jawa.⁴⁶

2. Visi dan Misi Desa Bukit Makmur .

Menjadikan perubahan yang lebih baik lagi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, segi ekonomi dengan di landasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan desa. Adapun misinya adalah :

1. Menciptakan pemerintahan yang lebih baik lagi (good government) berdasarkan demokratisasi,transparansi, yang efektif dan bersih.
2. Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan masyarakat Desa yang demokratis dan agamis.
3. Menentukan kebijakan yang akan mendorong perkembangan dunia pendidikan, dan mewujudkan pembangunan moral, spiritual melalui bidang keagamaan dan budaya.⁴⁷

3. Kondisi Geografis

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Darsani, Kepala Desa Bukit Makmur,pada hari senin 26 November 2018,jam 9:30 wib di kantor kepala Desa Bukit Makmur.

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Jumharis selaku sekretaris Desa Bukit Makmur, hari senin tgl 26 November jam 10:00 wib di Kantor Kepala Desa Bukit Makmur.

Semenjak kepemimpinan Kepala Desa tahun 2014 sampai sekarang yang di pimpin oleh Bapak Darsani mengalami perkembangan yang dikit demi sedikit mengalami kemajuan, misalnya dalam pembangunan jalan dan pembangunan jembatan, dan dalam hal segi gotong royong, sebelum kepemimpinan Bapak Darsani dalam Pemerintahan Desa ini, masyarakat Desa Bukit Makmur kurang memperdulikan dalam kemajuan Desa, melainkan hanya mementingkan diri masing-masing terutama dalam segi hal kebersihan, dan dalam membentuk kenyamanan Desa. Setelah dalam kepemimpinan Bapak Darsani ini, mulailah masyarakat mulai di gerakkan kembali terkait dengan kegiatan gotongroyong sesama warga, yang rutin dilakukan pada setiap hari jumat sebelum melaksanakan Sholat Jum'at, agar terciptanya lingkungan Desa yang nyaman, bersih dan Makmur.⁴⁸

4. Demografi Kependudukan

Desa Bukit Makmur mempunyai penduduk sebanyak 1154 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 572 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 582 jiwa, desa Bukit makmur memiliki jumlah 283 kk, dan luas wilayah desa Bukit Makmur adalah 256 Ha. Yang terletak di kecamatan Muara saung.

Perekonomian desa Bukit Makmura dalam kebun kopi sebagai sumber utama, selain kopi ada beberapa penghasilan seperti; kebun karet dan sawit, buah-buahan, dan sawah padi. Kondisi geografis dataran tinggi membuat tanaman seperti pohon kopi dan menjadi lebih bagus dibandingkan dengan dataran yang lebih rendah.⁴⁹

Untuk keagamaan masyarakat desa Bukit Makmur 100% memeluk agama Islam. Masyarakat desa Bukit Makmur menggunakan bahasa Semende karena penduduk lokal, namun untuk pendatang seperti Jawa, mereka menggunakan bahasa Jawa. Berdasarkan jumlah rasio pertumbuhan penduduk di desa Bukit Makmur setiap tahunnya mengalami perubahan.

Tabel.1
Daftar Rekapitulasi Penduduk Desa Bukit Makmur Tahun 2018

	Januari Bulan						Februari Bulan						Total
	Jumlah KK			Jumlah Penduduk			Jumlah KK			Jumlah Penduduk			
				5	1				8	3	2		
0		0	9	5	4		0		8	6	4	1	
					1							2	
6		3	2	4	54		8		2	1	3	55	
Maret 2018			52 Jiwa										

⁴⁸Wawancara dengan bapak Muhamad Arifin selaku Kaur pemerintahan, pada hari Selasa tgl 27 November jam 19:00.wib bertempat di rumah Bapak Arifin.

⁴⁹Observasi tanggal 12 November 2018 pukul 14.40 Wib.

Sumber :Dokumentasi, Data Desa Bukit Makmur Kecamatan Muarah Saung Kabupaten Kaur November 2018.

Data diatas adalah data yang diambil pada sepanjang tahun 2017, dan pada awal tahun 2018 perkiraan masih sama dengan akhir tahun 2017. Jumlah penduduk Desa Bukit Makmur adalah 1152 jiwa dengan jumlah 282 KK. Terdiri dari 570 laki-laki dan 583 perempuan.

Masyarakat Desa Bukit Makmur dengan penduduk 1152 jiwa bukanlah jumlah yang sedikit, dengan demikian penting bagi masyarakat untuk memiliki lembaga pendidikan, tempat beribadah, dan layanan kesehatan. Akses untuk mendapatkan ilmu atau mengamalkan ilmu tentunya perlu lembaga pendidikan baik formal, nonformal, atau informal. Tempat beribadah pun penting, meskipun melaksanakan ibadah bias dilakukan di rumah, namun masjid atau mushalla sangat penting bagi masyarakat, terlebih untuk kaum laki-laki yang membutuhkan masjid untuk shalat jum'at berjamaah. Kesehatan sangat penting bagi masyarakat, maka dari itu tersedianya tempat pelayanan kesehatan untuk memeriksa kesehatan secara rutin. Berikut ada table mengenai lembaga pendidikan, layanan kesehatan, dan tempat peribadatan secara urut.

Tabel.2
Jumlah Lembaga Pendidikan di Bukit Makmur

Formal/Nonformal	Formal	Non Formal
Jumlah Pendidikan	PAUD	Negeri
Jumlah Satuan		
Jumlah	seluruhan formal dan non formal ada 9 lembaga pendidikan di Bukit Makmur	

Sumber :Dokumentasi, Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur, November 2018.

Tabel di atas menunjukkan Data Desa Bukit Makmur Sembilan lembaga pendidikan di Desa Bukit Makmur baik formal maupun non formal.

Tabel.3
Daftar Pelayanan Kesehatan di Desa Bukit Makmur

No	Nama Sarana Kesehatan	Tempat
1	Puskesmas	Desa Bukit Makmur
2	Posyandu anak	Desa Bukit Makmur

Sumber :Dokumentasi, Data Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Saung november, 2018.

Tabel di atas menunjukkan ada dua tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat Desa Bukit Makmur untuk memeriksa kesehatan secara rutin.

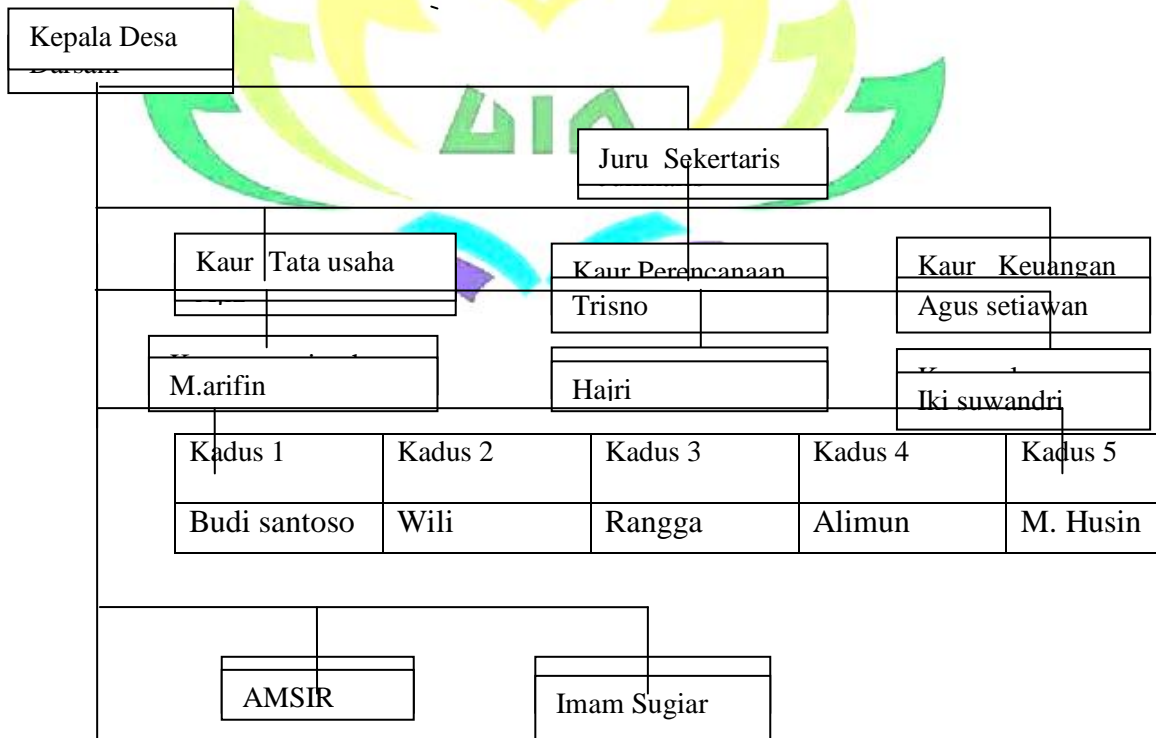
Tabel.4
Jumlah Tempat Beribadah di Desa Bukit Makmur

Rumah Ibadah	Masjid	Mushalla	Gereja	Vihara	Pure
Jumlah Satuan	3	1	-	-	-
Jumlah Keseluruhan	Ada 3 tempat beribadah				

Sumber :Dokumentasi, Data Bukit Makmur Kecamatan Muara Saung, November 2018.

Jika dilihat dari table diatas ada empat tempat peribadatan, dan keempat tempat tersebut adalah masjid dan mushalla, yang menunjukkan agama Islam, dan tidak ada tempat peribadatan selain tempat ibadah agama Islam.

5. Struktur Pemerintahan Desa Bukit Makmur



Stuktur organisasi dan data kerja desa bukit makmur kecamatan muara saung kabupaten kaur provinsi bengkulu

Penjelasan fungsi dan tugas pada struktur susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa Bukit Makmur sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Secara eksplisit pasal 26 ayat (1) undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa mengatur tempat tugas utama kepala Desa yaitu: menyelenggaraan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, melaksanakan Pembinaan masyarakat Desa, dan memberdayakan masyarakat Desa. Dan tugas yang di berikan, kepada kepala desa di harapkan bisa membawa kearah yang di harapkan⁵⁰.

b. Seketaris Desa

Pasal 7 peraturan menteri dalam negeri nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa mengatakan bahwa:

Ayat (2) seketaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan.

Ayat (3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), seketaris Desa mempunyai fungsi:

1. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata Naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber- sumber pendapatan dan pengeluaran. Verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka

⁵⁰Undang-Undang No 6 Tahun 2014, *Tentang Kepala Desa*, Pasal 26 ayat(1)

pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan⁵¹.

c. Kepala Urusan (kaur)

Pasal 8 peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan Organisasi Dan tata Kerja pemerintah Desa mengatakan bahwa:

Ayat (2) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Ayat (3) untuk melaksanakan tugas Kepala urusan, mempunyai fungsi:

a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti

melaksanakan urusan ketata usahanan seperti tata naska, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedesi, dan pendataan administrasi perangkat Desa dan Kantor, persiapan rapat, pengadministrasian aset, inventariasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melakanakan urusan

keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga lainnya.

c. Kepala urusan peencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan

perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

d. Kepala Seksi

⁵¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa*, Pasal 8

Pasal 9 peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan Organisasi dan tata kerja pemerintah Desa mengatakan bahwa:

Ayat (2) kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksanaan tugas oprasional. Ayat (3) untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:

1. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan Profil Desa.
2. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang Budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
3. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan⁵².

e. Kepala Dusun

Pasal 10 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan Organisasi dan tata kerja pemerintah Desa mengatakan bahwa:

Ayat (1) Kepala wilayahan atau di sebut lainya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya di wilayahnya.

Ayat (3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (2) Kepala kewilayahan/ Kepala Dusun memiliki fungsi:

⁵²*Ibid*, Pasal 9.

1. Pembinaan dalam ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan⁵³.

f. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Menurut Darsani bahwa BPD mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan tugas BPD adalah sebagai berikut:

1. Membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.
3. Memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
4. Bersama Kepala Desa Membentuk panitia pemilihan perangkat Desa;
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

g. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

Peraturan Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan mengatakan bahwa:

Pasal 8 mengatakan bahwa: lembaga pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat,

⁵³Op,Cit. Pasal 10

melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 9 mengatakan bahwa : lembaga pemberdayaan masyarakat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 mempunyai fungsi :

1. Menampung menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pemabangunan
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan dalam rangka memperkokoh Negara Republik Indonesia;
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan perkembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Penumbuh kembangan dan pengerak prakasa, partisipasi, serta seadanya gotong royong masyarakat dan;
6. Penggali, pendaya gunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup⁵⁴.

B. Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa di Desa Bukit Makmur

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pelaksanaan Pemilihan kepala desa di desa Bukit Makmur, kecamatan Muara sahung, Kabupaten Kaur, provensi Bengkulu, sama halnya dengan pemilihan presiden, gubernur, bupati dan walikota dimana pemilihan tersebut dilakukan langsung oleh masyarakat setempat yang mana proses pemilihannya bersifat langsung, rahasia, bebas, adil dan jujur.⁵⁵

⁵⁴Peraturan Menteri Dalam sNegeri Nomor 5 Tahun 2007, *Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*, Pasal 8-9.

⁵⁵ Wawancara bersama Bapak Imam Budiono selaku ketua panitia pemilihan, hari rabu, tgl 28 November jam 8:30 wib, bertempat di balai Desa Bukit Makmur.

Dasar yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2016 Pasal 22 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan peraturan dibentuk pemerintah Kabupaten Kaur sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan juga sebagai payung hukum penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur. Pada Tahun 2014 Kabupaten Kaur, untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan kepala desa serentak yang diikuti oleh beberapa Desa yang terletak di kecamatan Muara Sahung. Hal ini penting karena penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna untuk keberhasilan dengan pemberdayaan seluruh masyarakat, hanya akan terwujud manakala ada Kepala Desa yang tetap dan terpilih dengan cara yang demokratis. Dalam hal ini Kepala Desa merupakan figur yang sangat penting dan strategis peranannya dalam rangka memajukan masyarakat desa dan pemerintahan desa setempat.

Untuk mewujudkan semua itu, jelas diperlukan adanya suatu proses pemilihan Kepala Desa (pilkades) yang didasarkan pada peraturan perundang undangan yang ada. Pendasaran itu penting adanya hal ini dikarenakan proses pilkades sangat panjang dan saling terkait, mulai dari pendaftaran untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan Kepala Desa yang berdedikasi, cakap, dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi daerah, Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, Desa merupakan suatu wilayah yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten serta dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa dalam memimpin Desa tidaklah berjalan tanpa dukungan dari masyarakat. Termasuk dukungan dari Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam hal ini kepala desa adalah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD.⁵⁶

Dan dilanjutkan dengan proses pencalonan dan pemilihan seperti yang telah di jelaskan oleh permendagri yang secara rinci seperti di bawah ini. Tahun 2014 adalah tahun politik sedang panas-panasnya bagi bangsa Indonesia, karena menjadi masa pemilihan anggota legislatif dan juga pemilihan presiden. Akibatnya, atas inisiatif bupati pun kepala daerah, tak sedikit hajatan pemilihan Kepala

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Trisno selaku Kaur perencanaan, hari kamis tgl 28 novemb 2018.jam 17:00 wib, bertempat di rumah bapak Trisno

Desa ditunda pada tahun berikutnya.

Pemilihan Kepala Desa bagi warga justru terlihat marak karena tak sedikit warga yang antusias hendak maju mencalonkan diri pun memilih calon yang diidam-idamkannya. Nah, sehubungan dengan Pilkades atau Pemilihan Kepala Desa ini, ada satu peraturan yang telah diterbitkan pada akhir tahun 2014 yaitu yang berwujud Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014. Telah dikeluarkan Permendagri Nomor 111 tahun 2014 yang berisi tentang pedoman teknis peraturan di Desa, di mana ada hubungan Kepala Desa dan Wali Kota/Bupati ihwal evaluasi dan juga klarifikasi rancangan peraturan desa, maka terdapat pula kelanjutan yang merupakan Permendagri Nomor 112 dengan pokok bahasan tentang Pemilihan Kepala Desa Sebagaimana pada peraturan lain, pada permendagri Nomor 112 tahun 2014, Pasal Pertama dan di Bab(2) juga dibahas mengenai ketentuan umum yang harus dijalani dalam pemilihan kepala desa.

Salah satunya adalah mengenai panitia pelaksana pemilihan kepala desa, sebagaimana tertera pada pasal ke-1, 7, 8, dan 9, sebagaimana di sebutkan:

1. Panitia pemilihan Kepala Desa, di dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.⁵⁷

Adapun hasil Panitia Pemilihan yang di bentuk oleh Badan Perwakilan Desa yaitu:

1. Imam Budiono sebagai Ketua,
 2. Burhanudin sebagai Sekretaris,
 3. Heri irawan sebagai bendahara,
 4. Alhadi sebagai anggota,
 5. Robinson sebagai anggota.
2. Calon Kepala Desa

Menurut Pahrudin sebagai toko agama masyarakat setempat, bahwa Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon, maka itulah yang berhak dipilih untuk menjadi Kepala Desa.⁵⁸

⁵⁷Wawancara bersama Bapak Darsani selaku Kepala Desa Bukit Makmur, hari senin tgl 26 November, 2018, jam 8:30 wib, bertempat di Kantor Kepala Desa Bukit Makmur.

⁵⁸Wawancara bapak Pahrudin sebagai toko agama di Desa Bukit Makmur, hari senin, tgl 26 November 2018 jam 13:00 wib bertempat di masjid Al- ikhlas Desa Bukit Makmur.

Pemilihan secara bergelombang Sebagaimana pada pemilihan yang diselenggarakan secara serentak, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang juga didasarkan atas berbagai alasan. Hal itu seperti yang termaktub pada pasal 4 yaitu:

1. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten/Kota.
 - b. kemampuan keuangan daerah;
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Sebagaimana di jelaskan paling awal pada Bab ke-1, pasal ke-6 menjadi bagian dari hal yang mengatur “pelaksanaan” pemilihan Kepala Desa. Di antaranya adalah yang mengatur tentang tahapan pemilihan kepala Desa, yaitu meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

2. Pra Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7 dari Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 memuat tentang kegiatan awal yang musti dilaksanakan jelang penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Berikut adalah beberapa ketentuan sebagaimana terikutip pada butir-butir yang terdapat dalam pasal ke-7 yaitu:

1. Pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.⁵⁹
2. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
3. Laporan akhir masa jabatan kepala desa, kepada bupati, disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

⁵⁹Permendagri No 112 Tahun 2014, tentang PILKADES

4. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
5. Persetujuan biaya pemilihan dari bupati, jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

3. Tugas-Tugas Panitia Pelaksana Pemilihan Desa

Beberapa tugas yang harus dilaksanakan Panitia pemilihan Kepala Desa telah diatur sesuai pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 adalah:

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.
2. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada bupati/walikota melalui camat.
3. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih.
4. Mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon.
5. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan.

4. Syarat-Syarat Pemilih Kepala Desa

Dalam Pasal selanjutnya, yaitu pasal 10 adalah pasal yang mengatur tentang pemilihan yang memiliki hak pilih demi menentukan kepala desa.

Dan Ketentuan-ketentuan yang menyatakan keesahan para pemilih ini tercantum dalam pasal 10 sampai dengan pasal 20.

5. Syarat Calon Kepala Desa

Syarat menjadi kepala desa telah diatur dalam Pasal 21, di sebutkan:

1. Warga negara Republik Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika.

4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.

5. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.

6. Kampanye

Menurut Heri irawan Dalam Pemilihan Kepala Desa Seperti halnya yang sering kita saksikan pada saat pemilihan presiden, pada pemilihan kepala desa juga disediakan waktu untuk berkampanye bagi mereka yang mencalonkan diri. Visi dan misi menjadi penting untuk dikemukakan demi menarik simpati.⁶⁰

Dan adapun ketentuan dalam kampanye pemilihan kepala desa dijelaskan pada pasal 29, Kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:

1. Pertemuan terbatas.
2. Tatap muka.
3. Dialog.
4. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum.
5. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

6. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Perihal kampanye pilkades dijelaskan dari pasal 27 hingga pasal

⁶⁰ Wawancara bersama Bapak Heri irawan , bertempat di rumahnya ,hari kamis jam 14:30 wib tgl 29,november,2018.

31, sedangkan pasal 32 berisi tentang masa tenang yang di dalamnya juga menerangkan bahwa 3 hari menjelang hari H pemungutan suara. Panduan mengenai pemungutan dan penghitungan suara tertulis dalam Permendagri 112 tahun 2014 pasal 33 sampai dengan pasal 43. Ada banyak mekanisme yang dipaparkan di sana. Selain waktu pemilihan, ada pula syarat pemilihan bagi orang yang berkebutuhan khusus (disabilitas), mereka yang sedang rawat inap, ketentuan keberadaan TPS.

7. Penetapan Kepala Desa.

Menurut Imam Budiono sebagai ketua panitia, bahwa ketua panitia pemilihan, menyusun dan membacakan berita acara pemilihan. Berita acara pemilihan di tanda tangani oleh ketua panitia pemilihan, saksi-saksi pemilihan, dan seluruh calon Kepala Desa. kemudian ketua panitia mengumumkan hasil dari pemilihan tersebut dan sahnya dalam pemilihan kepala desa.

8. Masa Jabatan Kepala Desa

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 32 yaitu “Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (tahun) dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan.”⁶¹

Barang siapa yang melanggar undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal (32) di sebutkan yaitu “ Kepala Desa akan diberhentikan menjadi Kepala Desa dan akan digantikan dengan yang lainnya” dan telah diatur juga dalam Peraturan Pemerintahan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang

⁶¹ UU, No, 06 Tahun 2014, Tentang Desa.

Desa, pada pasal 17 ayat(2) huruf a yang berbunyi : “berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru”.

2. Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa

Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik, dari para bakal calon kepala desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh para bakal calon kepala desa biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala desa berlangsung, dengan berbagai cara yang seringkali mengabaikan etika politik, seperti adanya intrik-intrik terror dan politik uang(*mony politic*). Pada umumnya para calon kepala desa memiliki jaringan kekeluargaan yang sangat kuat, solid dan kompak serta bagi yang memiliki modal uang besar, paling memiliki potensi besar pula untuk memenangkan pemilihan.⁶²

Kepala desa Para bakal calon biasanya orang yang kuat secara politik dan ekonomi di desanya. Selain menjalani aktivitas dalam Pilkades, masyarakat desa dapat juga menjadi partisipan dalam Pilkades dengan cara ikut menjadi juru kampanye (Jurkam) dalam mensosialisasikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon kades, ikut menjadi anggota aktif dari kelompok kepentingan seperti menjadi tim sukses atau mendukung salah satu calon kades, aktif dalam proyek-proyek sosial atau program-program sosial desa seperti mempromosikan program-program yang akan

⁶²Wawancara bersama ibuk Yulia Eka selaku warga Desa Bukt Makmur, hari jumat tgl 30 november 2018 jam 14:00 wib bertempat di rumah Ibu Eka.

dicapai dari salah satu calon kades tersebut, misalnya calon kades tersebut ingin membangun sarana air bersih bagi masyarakat desa yang belum mendapatkan sarana air bersih.

Hasil penelitian lewat wawancara bahwa sosialisasi politik dan pendidikan bagi warga negara teristimewa masyarakat yang sudah wajib memilih sangat penting untuk dilakukan. Upaya pelestarian sistem politik dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan politik, antara lain sosialisasi politik dan pendidikan politik. Kedua kegiatan komunikasi politik itu merupakan suatu proses dalam membentuk sikap dan perilaku para calon penerima sistem dan penerus sistem di masa yang akan datang. Sosialisasi politik sering juga disamakan dengan pendidikan politik sebagai suatu aktivitas mempengaruhi, mengubah dan membentuk sikap dan perilaku berdasarkan nilai-nilai yang telah dianggap benar dan telah memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Kemudian salah satu Pendapat Warga Tentang Pemilihan Kepala Desa Setempat Seorang Bapak yang berpenampilan tegas dan lugas ini mempunyai nama Amirul Mukminin dengan panggilan (Amok) ini. Beliau adalah seorang Guru di salah satu SMA di Kecamatan Muara Sahung. Banyak kalangan warga Desa Bukit Makmur mengenal beliau sebagai orang yang serba bisa dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Seiring dengan keahlian dalam berbagai bidang dan telah dikenal warga sebagai tokoh masyarakat, maka Ketua BPD dan juga Sebagai Ketua Pemilihan Kepala Desa mengangkat beliau ini sebagai sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Menurut beliau pada dasarnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di

Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung berlangsung cukup demokratis hal ini dapat dilihat mulai dari pada saat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa meskipun pemilihannya tidak dilakukan melalui pengumuman terlebih dahulu kepada masyarakat banyak, tetapi pemilihan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan cara mengambil dari perwakilan tokoh masyarakat, aparat desa, dan anggota BPD hal tersebut dikarenakan efektifitas waktu dan dipandang tokoh-tokoh masyarakat merupakan perwakilan dari para warga masyarakat, dengan kata lain terdapat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Bapak Amirul Mukminin berpendapat bahwa Kinerja panitia dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa cukup baik hal ini terbukti dengan lancarnya semua proses dalam urutan Pemilihan Kepala Desa mulai dari pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa hingga Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Tetapi berdasarkan pernyataan Bapak Amirul Mukminin di dalam Kepanitiaan tak dapat dipungkiri terdapat beberapa orang panitia yang memang juga merupakan tim sukses atau pendukung dari salah satu Calon Kepala Desa, akan tetapi dukungan tersebut tidak sampai menjadikan kinerja panitia menjadi buruk. Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terdapat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pihak panitia telah bekerja secara maksimal. Jikalau terdapat pelanggaran sebagai contoh pemasangan tanda gambar yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada maka kami selaku panitia akan menindaknya, tetapi tindakan ini juga terjadi apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan melaporkannya kepada panitia. Bukan

berarti pula panitia tidak tegas tetapi memang para panitia juga mempunyai kesibukan lain yang berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari, begitulah secara singkat yang tersirat dalam wawancara dengan Bapak Amirul Mukminin.⁶³

Terkait dengan adanya politik uang (*mony politic*), Bapak Amirul Mukminin selaku warga berpendapat bahwa adanya politik uang (*Money Politic*) dalam Pemilihan Kepala Desa merupakan sesuatu yang wajar tidak hanya dalam Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan yang lainnya yang berkaitan dengan adanya kekuasaan maka politik uang (*mony politic*) itu sering terjadi dan dapat dikatakan telah membudaya. Adanya money politik memang sulit dibuktikan tetapi dari beberapa indikasi dan pernyataan dari beberapa warga memang telah terjadi politik uang (*mony polite*). Hal tersebut sulit untuk dibuktikan dan berakibat, karna tidak adanya hukuman yang tegas bagi para Calon Kepala Desa yang melaksanakan politik uang (*mony politic*) dalam hukum positif.

Istilah politik uang (*mony politic*) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Dengan adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah

⁶³Wawancara bersama Bapak Amirul Mukminin selaku warga sekaligus setretaris panitia pemilihan Kepala Desa, Desa Bukit Makmur, hari rabu tgl, 28 November 2018, jam 09.30 WIB, Di rumah bapak Amirul Mukminin.

merasa teruntungkan.⁶⁴

Politik uang tergolong ke dalam modus korupsi pemilu, Ada empat model korupsi pemilu yang berhubungan dengan politik uang, yaitu :

1. Membeli suara (*vote buying*),
2. Membeli kandidat(*candidacy buying*),
3. manipulasi pendanaan kampanye
4. dan manipulasi administrasi dan perolehan suara (*administrative electoral corruption*).

Praktik politik uang(*mony politic*)ini banyak dilakukan oleh peserta pemilu. Ironisnya, praktik ini tidak tersentuh oleh penegakan hukum akibat sebagian masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang lumrah. Hal ini bisa di buktikan dari hasil polling Litbang Harian Kompas menemukan bahwa sebagian besar publik tidak menolak kegiatan bagi-bagi uang(*mony politic*) yang dilakukan calon anggota legislatif maupun partai politik. Bahkan banyak anggota masyarakat menganggap politik uang sebagai rejeki musiman yang sayang ditolak.⁶⁵

Politik uang (*mony politic*) tumbuh subur didukung oleh kecenderungan masyarakat yang makin permisif dan menganggap bahwa politik uang (*mony politic*) tersebut sebagai biaya ganti rugi dari para kontestan karena pada hari pemilihan mereka tidak pergi ke ladang ataupun sawahnya. Bisa juga politik uang (*mony politic*) itu dianggap

⁶⁴Ebin Danius, Politik Uang dan Uang Rakyat, Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/.

⁶⁵Wawancara bersama Bapak Imam Budiono, selaku ketua paniti pemilihan, di Desa Bukit Makmur, hari rabu, tgl 28,november 2018. Jam, 9:30 wib,di balai desa bukit makmur.

sebagai kesempatan mendapatkan rejeki, karena bagi mereka siapapun yang terpilih tidak bermakna apapun bagi diri, dan kelompoknya.⁶⁶



⁶⁶Hepi Riza Zen, Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah, *Jurnal Al-Adalah*, Vol XII. No.3. (2015)

BAB IV

ANALISIS

A. Pelaksanaan Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Bukit Makmur

Telah diuraikan pada BAB II, bahwasanya Etika politik merupakan prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan dalam konstitusi Negara. Bahwasannya, pelaksanaan sosialisasi politik dapat dilaksanakan dengan baik melalui berbagai sarana yang ada, maka masyarakat dalam kehidupan politik kenegaraan sebagai satu sistem akan lahir dan berkembang budaya politiknya secara proporsional, jujur dan adil, serta bertanggung jawab sehingga terwujudlah budaya politik santun, bersih dan beretika. Ini berarti, tanggung jawab masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Adapun dari hasil observasi lapangan yang peneliti temukan di Desa Bukit Makmur pada pemilihan kepala desa, bahwa pada tahun 2014 yang lalu, secara keseluruhan dalam pelaksanaan proses pemilihannya, sudah baik menurut teorinya yang di kemukakan di atas, bahwa pemilihan kepala desa bukit makmur, dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta bertanggung jawab sehingga terwujudlah budaya politik santun, bersih dan beretika.⁶⁷

Hal ini bisa dilihat dari lancarnya proses pemilihan kepala desa, desa

⁶⁷Wahyu widodo, "Mewujudkan Budaya Politik Santun, Bersih, dan Beretika". *Jurnal humaika*, vol.19 No 1(2014), h, 115.

bukit makmur, dimulai dari pembentukan panitia sampai pemungutan suara tanpa ada pelanggaran yang berarti. Walaupun terdapat dinamika sosial yang berimbas konflik sosial. Karena dalam demokrasi adalah konsep yang paling baik diterapkan dalam sistem pemerintahan negara. Tetapi masih menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Sebab dalam pemerintahan yang demokratis, itu semua melibatkan seluruh masyarakat dan menempatkan kedudukan setiap orang dalam politik, sehingga bisa mengikuti partisipasi secara langsung atau diwakilkan, karena dilihat dari lancarnya proses pemilihan kepala desa tersebut, dimulai dari pembentukan panitia sampai pemungutan suara tanpa ada pelanggaran, Walaupun terdapat suatu dinamika sosial yang berimbas konflik sosial. Karena demokrasi adalah konsep yang paling baik diterapkan dalam sistem yang mereka pilih dalam memilih kepala negara. Apabila akhlak, dan etika kurang baik maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Seperti salah satunya etika yang kurang baik, yaitu adanya politik uang (*money politic*) yang sudah lazim terjadi di kalangan masyarakat.

Poin-poin yang menjadi objek penting dalam analisa yang berkaitan dengan proses pelaksanaan etika politik pemilihan kepala desa, di desa bukit makmur yang meliputi yaitu:

a. Proses Penjaringan Calon Kepala Desa

Adapun menurut bapak Burhanudin sebagai ketua panitia

pelaksana, proses penyaringan yang akan calon, maka akan ditentukan syarat-syaratnya yaitu:

1. Bukti bahwa pernyataan bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa.
2. Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, UUD 1945, setia dalam menjaga NKRI dan bhinika tunggal ika.
3. Photo copy ijazah dilegalisir
4. Photo copy akte kelahiran dilegalisir
5. Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai kepala kampung.
6. Surat pernyataan domosili di pemerintah kampung.
7. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
8. Surat keterangan kesehatan
9. Visi dan misi

Dalam persyaratan yang di sebutkan di atas maka dari tinjauan fiqh siyasah sangat jelas bahwa itu berbeda karena persyaratan itu lebih banyak ke segi administrasi bukan pada kemampuan seseorang dalam memimpin. dan Selain itu persyatan penjaringan bakal calon akan mengabaikan prinsip-prinsip akhlak sebagai seseorang pemimpin, dalam ajaran Islam diajarkan bahwa syarat-syarat menjai calon pemimpin salah satu diantaranya adalah *amanah*, yaitu bersikap bertanggung jawab atas apa yang di amanahkan.⁶⁸

B. Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Bukit Makmur

Perspektif *Fiqh Siyasah*

⁶⁸⁶⁸Wawancara bersama Bapak Burhadunidin selaku bendahara pelaksana pemilihan, hari jumat tgl 30 November 2018 jam 9:30 wib bertempat di rumah bapak Burhanudin.

Dalam Pelaksanaan pemilihan kepala desa, di desa bukit makmur Kecamatan muara sahung Kabupaten kaur tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa lainnya. Pemilihan kepala desa diberbagai daerah di Indonesia memang masih perlu dikaji, karena dalam proses pemilihan kepala desa masih banyak melakukan segala macam cara untuk mencapai suara terbanyak atau kemenangan dalam pemilihan.

Sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat sering dijadikan alasan untuk mendepak etika dan moral di area politik. Dalam demokrasi, etika dan moral nampaknya sudah tidak menjadi pertimbangan lagi.

Memilih seorang pemimpin menjadi sangat *urgen* dan wajib adanya, dalam Hadis Rasulullah yang diriwayatkan Abu Daud yang mana bunyinya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بْنُ بَرِّيٍّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya : “apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin.” (HR. Abu Daud No.2241)⁶⁹⁷⁰

Dari penjelasan hadis diatas bahwasanya dapat disimpulkan, jika dalam perkara berpergian (*safar*) saja diwajibkan untuk memilih pemimpin, apalagi dalam segi halnya memilih pemimpin dalam tatanan Negara.

⁷⁰ HR.Sunan Abu Daud.

Tapi bukan berarti manusia berhak untuk menentukan sendiri metode pengangkatan pemimpin, Allah melalui Rasulnya memberikan contoh cara memilih pemimpin dalam sistem Islam. Dan satu satunya metode yang di akui umat Islam dalam mengangkat kepala Negara yaitu dengan cara *baiat*.. Dari *baiat* ini akan di peroleh seorang pemimpin (khalifah) muslimin, di bawah pemerintahnya dalam perspektif syariat status hukum suatu perkara. Bagaimanapun keadaan, kondisinya akan tetap selalu menjadikan AL-Qur'an dan Sunah dijadikan sebagai pijakan baku.⁷¹

Di Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut demokrasi, demokrasi di Indonesia juga terlihat dari budaya yang selalu di praktekkan dalam masyarakat dalam menghadapi masalah maupun saat memutuskan mengenai kepemimpinan dan akan melakukan kegiatan yaitu dengan melalui bermusyawarah . karena hal ini sesuai dengan aturan Hukum Islam, Dalam Islam bahwa setiap ada permasalahan yang harus dipecahkan , Allah SWT memerintahkan umatnya melalui bermusyawarah. Dalam Al-Qur'an Surah Ali Imron ayat 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka di sebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi

⁷¹M.ali, *Hukum Islam Prngantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Islam di Indonesia*,(jakarta : Rajawali, 2014) ,h.170.

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karna itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagii mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apanbila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (Q.S.Ali- Imran ayat 159).

Kata “urusan” dalam ayat di atas adalah urusan dalam berperangan, dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan. Bermusyawarah di Indonesia merupakan untuk menentukan pemimpin dengan cara melakukan pemilihan langsung.

Jadi, pemilihan Kepala Desa serentak di desa Bukit Makmur ini, menurut teorinya Wahyu Widodo, dan peraturan pemerintah No 65 Tahun 2014, dari segi substansinya sudah sesuai dengan *fiqh siyasa* yang telah di paparkan di atas, tidak bertentangan denganya, dan telah memenuhi prinsip pemilihan dalam Islam yaitu *syura* yang bertumpu pada persamaan, keadilan, kebebasan transpransi, dan kebersamaan. Dan perbedaan terdapat hanya pada tataran teknis, karena harus sesuai dengan kondisi sosial yang ada demi tercapainya kemaslahatan Umat.

Dalam Islam mengakui adanya prinsip-prinsip demokrasi yakni disebut *syura*. Demokrasi bukanlah hal yang identik dengan Islam, tapi bukan pula harus di pertentangkan. Demokrasi dapat menjadi bagian dari sistem politik Islam apabila sitem nilainya diberi muatan nilai-nilai agama dan moralitas. Dari berbagai pendapat mereka tersebut sesuai dengan apa yang

dilakukan oleh masyarakat desa bukit makmur. dalam menentukan kepala desa mereka menyelenggarakan pemilihan kepala desa, yang mana dipilih langsung oleh masyarakat tanpa meninggalkan etika yang baik.

Dalam pelaksanaan pilihannya, pemerintahan desa memberikan kebebasan pada masyarakat untuk memilih sebagai kepala desa sesuai dengan hati nurani mereka tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Jadi menurut penulis bisa dikatakan bahwa dari tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi etika demokrasi di Desa Bukit Makmur dalam pemilihan kepala desa semua sudah berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan fiqh siyasah.

Namun masih ada satu etika yang kurang baik masih sering terjadi dikalangan masyarakat setempat yaitu melakukan politik uang (*mony politics*) ataupun maraknya serangan pajar, itu menurut *piqh siyasah* dan hukum Islam tidak boleh karena itu merupakan kecurangan, demi mendapatkan suara yang banyak atau demi kemenangan. Politik uang (*mony politics*) adalah gejala yang telah berlangsung dari pemilu ke pemilu dan seringkali tidak tersentuh oleh penegakan hukum. Gejala tersebut bertentangan prinsip kejujuran dan dapat mengakibatkan terpilihnya pemimpin yang tidak kredibel.

Dalam pandangan Islam, politik uang dapat dikiaskan dengan perbuatan suap/ sogok atau *risywah* yaitu suatu pemberian dalam bentuk hadiah yang diberikan kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan tertentu yang bernilai lebih besar. *Risywah* terlarang dalam Islam dan larangannya diturunkan Allah sejak masa pertama kenabian Muhammad Saw. berbarengan dengan larangan melakukan praktik penyembahan terhadap

berhala, Hal ini menunjukkan betapa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang harus di jauhi karena dapat menyebabkan ketidakadilan, dan mewujudkan suasana ketidakpantasan.⁷² Maka dapatlah dikatakan bahwa hukum mengonsumsi dan menggunakan hasil politik uang (*mony politcs*) yang di*qiyâskan* dengan suap menyuap ini terdapat sejumlah landasan dasarnya dalam Alqur'an, Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Mudatsir : 1-7 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾
وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾

Artinya:“Wahai orang yang berselimut, bangkit- lah dan sampaikan peringatan kepada umat, agungkan Tuhanmu dan bersihkan pakaian mu, tinggalkan perilaku sesat (penyembahan terhadap berhala), dan janganlah kamu memberi karena meng- harapkan imbalan yang lebih banyak serta bersabarlah dalam memperjuangkan ajaran Tuhanmu”.(QS.Al Muddatsir:1-7)

Dan dalam ayat yang lain Alqur'an surah Al-Baqarah : 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

⁷²Hepi Riza Zen, Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah, *Jurnal Al-Adalah*, Vol XII. No.3 (2015)

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah :188).

Jadi Ayat diatas melarang manusia untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, yaitu memperoleh harta dari umat manusia yang lain, dengan cara melawan hukum Allah, dan mencoba menyiasati melalui upaya- upaya tertentu seperti halnya praktik suap-menyuap, padahal manusia itu mengetahui bahwa itu adalah merupa- kan suatu kecurangan. Mengingat bahaya yang ditimbulkan dari politik uang (*mony politics*) yang bisa merusak mentalitas masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang bermental peminta-minta dan senantiasa memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki- nya seberapa kecilnya kekuasaan yang dimilikinya tersebut. Dalam sebuah hadis dijelaskan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي (رواه ابوداود)

Artinya: “Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap”.(HR. Abu Daud)⁷³

Berdasarkan proses penetapan hukum yang secara berjenjang dan saling menguatkan tersebut dapat ditarik ketetapan hukum Allah Swt. bahwa

⁷³Hadist Riwayat Sunan Abu Daud,

memakan, memakai atau menggunakan hasil suap itu adalah haram, karena jelas spelakunya telah berbuat zalim, telah membangkang terhadap larangan Allah, menghindar dari arahan dan tuntunan-Nya, dan menentang ancaman-Nya serta tak peduli terhadap kasih sayang-Nya.



BAB V

PENUTUP

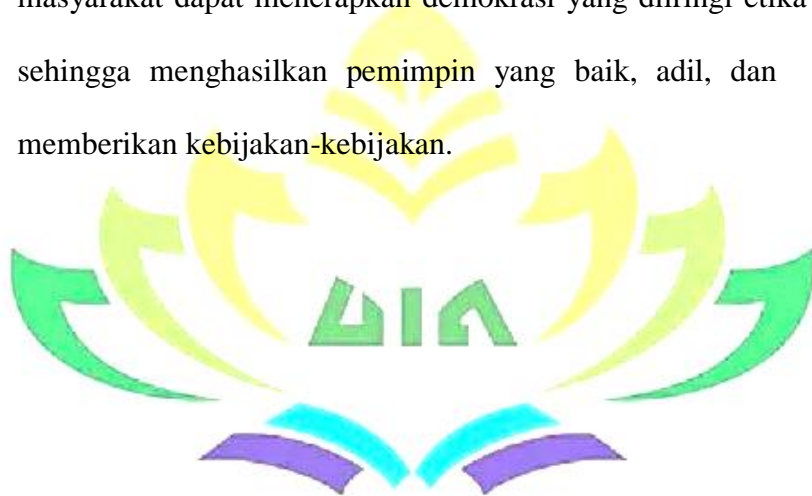
A. Kesimpulan

1. Dalam uraian yang penulis kemukakan di atas, maka Secara teoritis, pemilihan kepala Desa di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, sudah berjalan sangat bagus, namun secara aplikasinya belum sepenuhnya dipraktikkannya, seperti masih adanya perlakuan yang masih lazim berlaku di kalangan masyarakat, dan tidak sesuai dengan etika politik yaitu adanya permainan politik uang (*mony politic*) hal ini masih sering terjadi di kalangan masyarakat bahkan ada beberapa warga menganggap politik uang (*mony politic*) tersebut sebagai rezeki musiman.
2. Dalam metode *Fiqh Siyasah* Terhadap pelaksanaan Etika politik dalam pemilihan kepala Desa di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur sudah berjalan dengan baik, damai, adil, kecuali masih adanya praktik (*mony politics*).

Demokrasi dan *syura*’ bukanlah dua hal yang berbeda namun bukan juga harus di pertentangkan. Demokrasi dapat menjadi bagian dari sistem politik umat Islam apabila orientasi dan sistem nilainya diberi muatan nilai-nilai agama dan moralitas.

B. Saran

1. Buat pemerintahan pusat Panwaslu, KPU, baik itu pemerintahan daerah, BPD supaya untuk lebih meningkatkan lagi dalam mengawasi pemilihan kepala desa, dan perlu adanya tindakan tegas dari pihak penegak hukum dalam menangani pelanggaran dari sisi etika politik. Seperti, pemilihan yang lazim terjadi di kalangan masyarakat.
2. Dalam penelitian ini, hipotesa peneliti berharap kedepanya, kepada masyarakat dapat menerapkan demokrasi yang diiringi etika yang baik, sehingga menghasilkan pemimpin yang baik, adil, dan tegas dalam memberikan kebijakan-kebijakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Nata Abuddin, *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010
- Widodo Wahyu, *Muwujudkan Budaya Politik Santun, Bersih, dan Beretika*. Jurnal Humanika, Vol.19 No. 1. 2014
- HAW. Widjaja, *Pemerintah desa dan administrasi desa Menurut undang undang nomor 5 tahun 1979 (sebuah tinjauan)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Rumomoy, Nike K. “Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011”. *Jurnal Prinsip-Prinsip Pembentukan*, Vol. XXI No. 3. April-Juni 2013.
- Susilo, Rachmad K Dwi *Kebijakan Elitisi Politik Indonesia*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2006.
- Masri, Rasyid *Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan pedesaan*, Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Handayani, Risma *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, Makassar : Alauddin University Press, 2014.
- UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang Peraturan Daerah.
- UU pasal 72 Tahun 2005 tentang desa, UU nomor 52 tentang masa jabatan Kepala Desa (enam) 6 tahun dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- Pemilihan Kepala Desa” (On-line), tersedia di:
http://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/kepala-desa/pemilihan-kepala-desa/ (16 juni 2016).
- <https://www.slideshare.net/mobeli/abiyanka/permendagri-no112th2014>
pemilihakepala desa.

Kementrian Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahanya Dilengkapi dengan Asbabunnuzul dan Hadits Sahih*, Jakarta: SYGMA, 2010

Bakker, Anton *Metode-Metode Filsafat*, Jakara: Ghalia Indonesia, 1984.

Hadi, Surtisno *Metodelogi Reasearch*, Yogyakarta: Fak Psikologi UGM, 1985.

Arikunto, Suharsimin *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Renika Cipta, Jakarta, 2000.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Tanzeh, Ahmad *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.

Muhammad, Abdul Kadir *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004.

Surbakti Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Hariyantati Runi, *Etika Politik Dalam Negara Demokras*, *Jurnal Demokrasi*, Vol. II No 1 Th. 2003

Suseno Franz Magnis, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta : PT Gramedia.

Mulyawarman, *Prilaku Pemilih Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Kasus Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*, *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Vol 9, No 01. 2011.

UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang Peraturan Daerah

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta:: Prenamedia Group, 2014

Khamami Zada Mujaer Ibnu Syarif dan, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, Jakarta : Erlangga, 2008.

Gunawan Asep, *Artikulasi Islam Cultural*, jakarta : Raja Grafindo persada, 2004.

khallaf Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam*, yogjakarta : tiara Wacana yogya, 1994.

Al-Buraey Muhammad, *Islam landasan Alternarif Administrasi pembagunan*, jakarta : raja wali, 1986.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, Tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pasal 8

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pasal 8-9.

Wawancara bersama Bapak Amirul Mukminin selaku warga sekaligus sekretaris panitia pemilihan Kepala Desa, Desa Bukit Makmur, 28 November 2018, jam 09.30 WIB, Di rumah bapak Amirul Mukminin.

Danius Ebin, Politik Uang dan Uang Rakyat, Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/.

Zen Hesti Riza, *Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah*, Jurnal Al-‘Adalah, Vol XII. No.3. 2015.

M. Ali, *Hukum Islam Prngantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali, 2014.





Gambar 3.wawancara bersama bapak hajri 19:15 wib.



Gambar 4.wawancara bersama ibu Husmaini jam 8:10 wib



Gambar 1. Wawancara bersama bapak Pahrudin jam 13:00 wib



Wawancara bersama bapak Amirul Mukminin jam : 14:30 wib